

ABSTRAK

Semakin majunya suatu negara maka semakin banyak kejahatan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Banyak sekali modus-modus kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti halnya penipuan. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi, pada kenyataannya masih ada terhadap calon anggota CPNS yang telah merugikan banyak korban.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan kode etik profesi kepolisian dan faktor penyebab anggota kepolisian serta melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan disiplin terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai efek jera terhadap siapa saja yang melakukannya termasuk aparat penegak hukum sekalipun.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan selain itu anggota kepolisian yang bernama BRIPKA Oti terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP kemudian Ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP. Dan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan mengikuti sidang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Anggota Kepolisian, Kode Etik.

ABSTRACT

The more advanced a country, the more crimes that arise in life in society. There are so many modes of crime that arise in society as well as fraud. Members of the police who commit fraud in the modus operandi, in fact there are still candidates for CPNS members who have harmed many victims.

This study has two problem formulations, namely criminal liability for members of the police who commit criminal acts of fraud associated with the code of ethics of the police profession and the factors that cause police members to participate in committing criminal acts with the modus operandi. The research method used is to use the normative juridical approach method, and use descriptive analysis writing specifications and use data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and field research by conducting interviews with sources of information that are needed, and using data analysis methods namely qualitative analysis and drawing conclusions using the deductive method.

In this study aims to determine the application of criminal law against perpetrators of fraud and to find out the judge's considerations in imposing criminal sanctions and discipline against perpetrators of fraud. This law enforcement is expected to be a deterrent effect on anyone who does it including even law enforcement officers.

Law enforcement can be carried out using Article 378 of the Criminal Code concerning fraud and besides that a police member named BRIPKA Oti is ensnared Article 55 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code and then Mrs. Wulan is ensnared Article 378 of the Criminal Code. And police officers who commit crimes will attend the Police Professional Code of Ethics session.

Keywords: *Law Enforcement, Fraudulent Crimes, Members of the Police, Code of Ethics.*